



LAPORAN
KINERJA
BPMP PROVINSI RIAU
2023

Kata Pengantar

Dr. Nilam Suri

Kepala BPMP Provinsi Riau

“Laporan Kinerja sebagai gambaran objektif hasil kerja keras seluruh elemen di BPMP Provinsi Riau “



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BPMP Provinsi Riau berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Riau tahun 2023. BPMP Provinsi Riau pada tahun 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum BPMP Provinsi Riau telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BPMP Provinsi Riau pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BPMP Provinsi Riau pada Tahun 2023.

Pekanbaru, 30 Januari 2024
Kepala BPMP Provinsi Riau

Dr. NILAM SURI
NIP. 196912191994122002

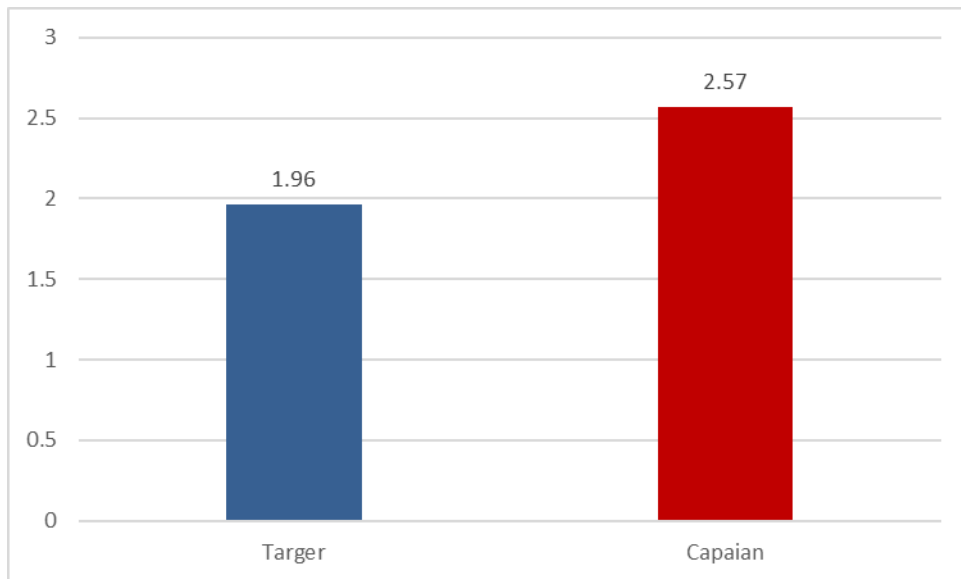


Ikhtisar Eksekutif

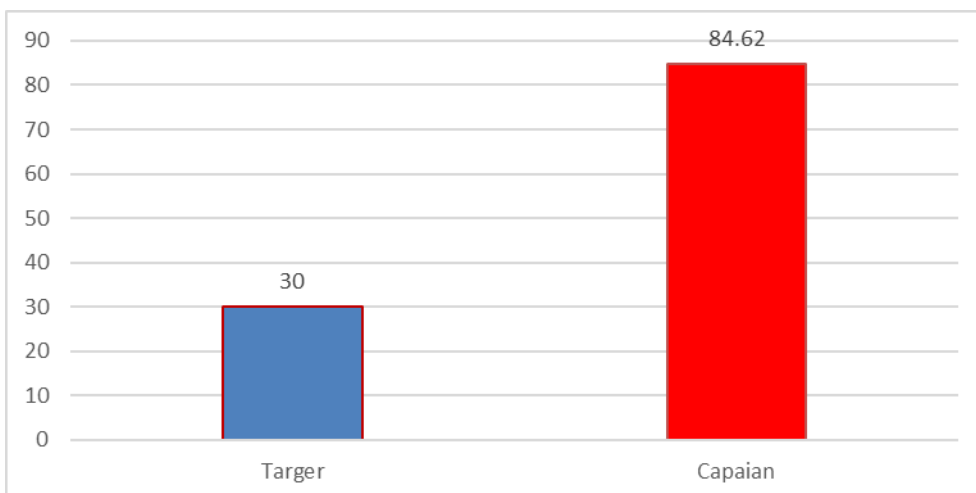
Laporan kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

IKK 1.1: Persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya



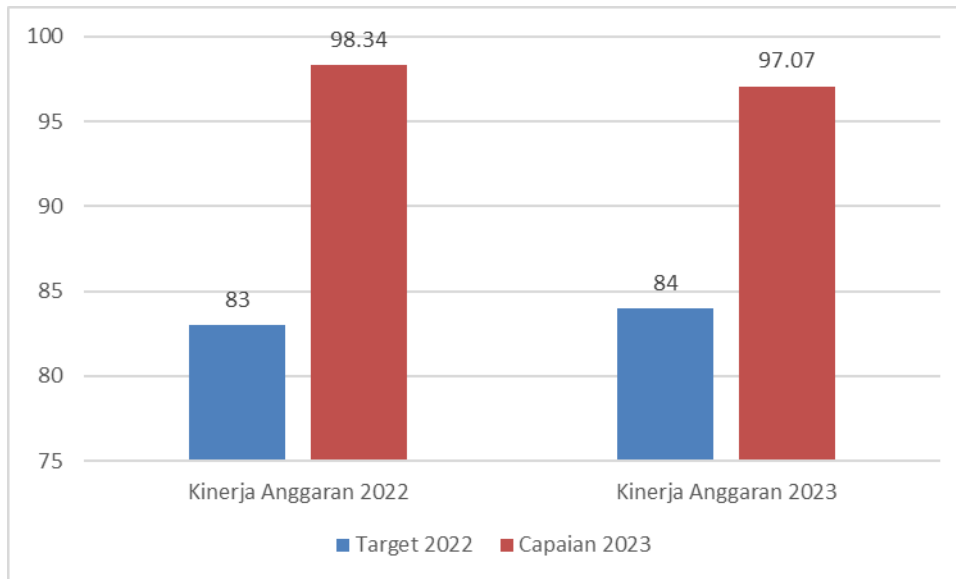
IKK 1.2: Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)



IKK 2.1: Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau

Satuan	2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Predikat	A	A	A	A

IKK 2.2: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau



Realisasi anggaran pada tahun 2023 mencapai angka 97,07% dengan total dana yang terserap sejumlah Rp. 23.769.298.564,-

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi secara umum dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Baru bergabungnya sumber daya manusia bidang PAUD Dikmas; dan
2. Kondisi geografis beberapa kabupaten di Provinsi Riau yang memerlukan usaha lebih untuk menjangkaunya.

Tindak lanjut dan langkah antisipasi yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi SDM PAUD Dikmas yang baru bergabung ke BPMP Prov. Riau;
2. menyesuaikan lama waktu penugasan untuk daerah dengan geografis yang sulit; dan
3. meningkatkan kolaborasi dan kemitraan lintas UPT Kemendikbudristek dan Mitra Pembangunan dalam pencapaian kesuksesan Program Prioritas Kemendikbudristek di Provinsi Riau.

Pada tahun 2023, BPMP Provinsi Riau memperoleh beberapa penghargaan antara lain:

1. Penghargaan sebagai Duta Merdeka Belajar Kategori Peningkatan SDM UPT dari Dirjen Paud Dikdas Dikmen Kemendikbudristek;
2. Penghargaan Duta Merdeka Belajar kategori Implementasi Tugas dan Fungsi UPT Dirjen Paud Dikdas Dikmen Kemendikbudristek;
3. Predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kemendikbudristek.
4. Predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Paud Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek.

5. Predikat sebagai Tim pendamping Percepatan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Dirjen Paud Dikdas Dikmen Kemendikbudristek.
6. Penghargaan atas Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dari Bupati Kepulauan Meranti

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi BPMP Provinsi Riau	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Visi BPMP Provinsi Riau	5
B. Misi BPMP Provinsi Riau	5
C. Tujuan Strategis	6
D. Rencana Kinerja Jangka Menengah	6
E. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Pengukuran Kinerja	9
B. Capaian Kinerja	10
C. Realisasi Anggaran	25
D. Inovasi, Penghargaan, Dan Program <i>Crosscutting / Collaborative</i>	32
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	40

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Foto Seluruh Pegawai BPMP Provinsi Riau.....	1
Gambar 1. 2 Wilayah Kerja BPMP Provinsi Riau	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1. 3 Tugas dan Fungsi BPMP Provinsi Riau	3
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Riau	4
Gambar 3. 1 Keadaan PNS BPMP Provinsi Riau Tahun 2023	18
Gambar 3. 2 Keadaan PPNPN BPMP Provinsi Riau Tahun 2023	18
Gambar 3. 3 Tampilan halaman depan aplikasi SITUAH.....	32
Gambar 3. 4 Tampilan submenu pembiayaan dalam aplikasi SITUAH.....	33
Gambar 3. 5 Tampilan submenu kuitansi pada aplikasi SITUAH	33
Gambar 3. 6 Tampilan submenu dokumen keuangan pada aplikasi SITUAH.....	34
Gambar 3. 7 Tampilan Submenu Pengajuan Tunjangan Kinerja Pada Aplikasi SITUAH.....	34
Gambar 3. 8 Tampilan submenu peminjaman dokumen keuangan pada aplikasi SITUAH...	35
Gambar 3. 9 Piagam Penghargaan predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.....	35
Gambar 3. 10 Piagam Penghargaan predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.....	36
Gambar 3. 11 Piagam Penghargaan predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.....	36
Gambar 3. 12 Penghargaan dari dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti	37

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja LPMP Provinsi Riau 2020 – 2021	6
Tabel 2. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja BPMP Provinsi Riau 2022 – 2024.....	7
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja 2023	7
Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023	8
Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023.....	8
Tabel 3. 1 Capaian kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2023	9
Tabel 3. 2 Capaian IKK persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran Tahun 2023	10
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dengan Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya Beserta Penjelasan Indikator Kinerja	13
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan Dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra Beserta Penjelasan Indikator Kinerja	13
Tabel 3. 5 Target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan indikator kinerja.....	16
Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dengan Capaian Kinerja Tahun- Tahun Sebelumnya Beserta Penjelasan Indikator Kinerja	16
Tabel 3. 7 Indikator Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	24
Tabel 3. 8 Revisi Belanja Pegawai	26
Tabel 3. 9 Revisi Anggaran	26
Tabel 3. 10 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2023.....	28
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Belanja	28
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	29
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Realisasi Belanja Barang Terhadap Pagu TA. 2023 dan 2022	30
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Realisasi Belanja Modal Terhadap Pagu TA. 2023 Dan 2022	30
Tabel 3. 15 Efisiensi Anggaran Tahun 2023	31

Daftar Grafik

Grafik 3. 1 Capaian Persentase Satuan Pendidikan (Paud Dan Dikmas) Yang Meningkatkan Mutu Pembelajarannya	11
Grafik 3. 2 Satuan Pendidikan Pelaksana Asesmen Nasional Tahun 2023 Provinsi Riau	14
Grafik 3. 3 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	21
Grafik 3. 4 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran	22
Grafik 3. 5 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran	23
Grafik 3. 6 Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Tahun Anggaran 2023 Dan 2022	23
Grafik 3. 7 Persentasi Realisasi Anggaran BPMP Prov. Riau Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Grafik 3. 8 Belanja Barang	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

BPMP Provinsi Riau merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan BPMP, bahwa untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu dilakukan pengintegrasian unit pelaksana teknis yang menangani fungsi penjaminan mutu pendidikan pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

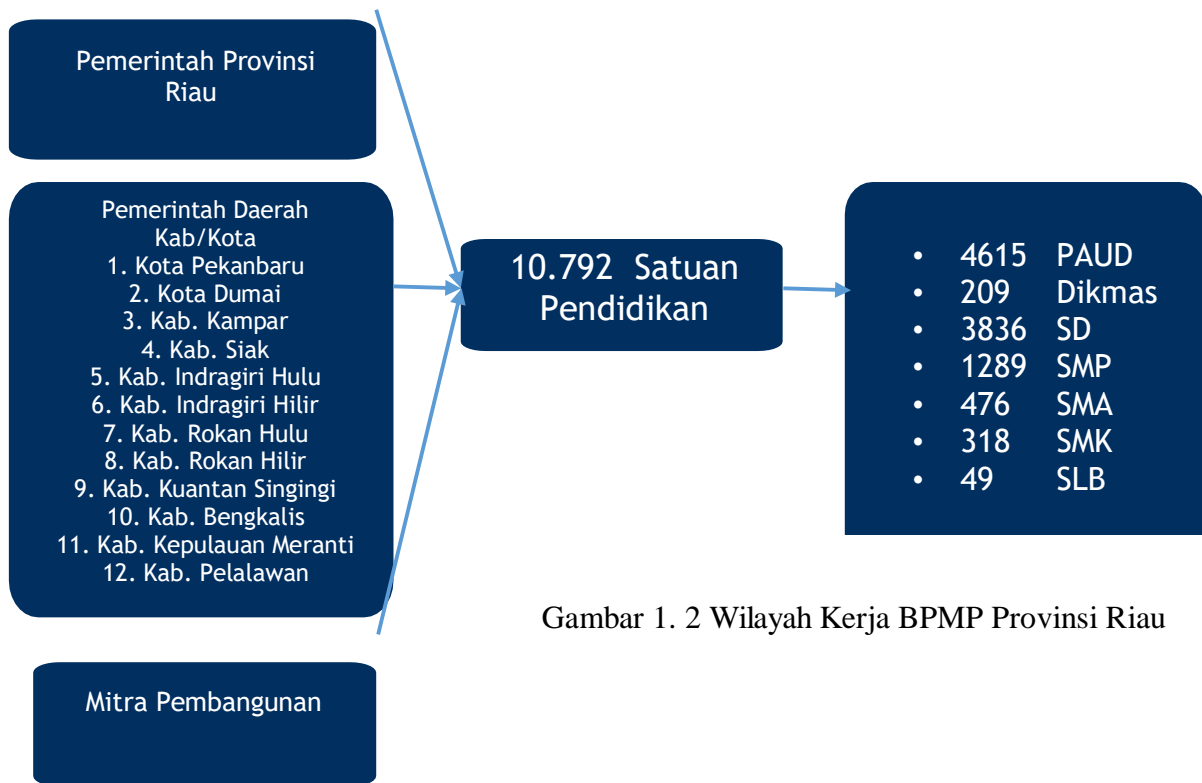
BPMP Provinsi Riau dipimpin oleh Dr. Nilam Suri dengan jumlah pegawai sebanyak 73 orang PNS dan 32 orang PPNPN.

Gambaran SDM BPMP Provinsi Riau

2 Pejabat struktural
15 Pejabat Fungsional
58 Pejabat pelaksana
32 PPNPN

Gambar 1. 1 Foto Seluruh Pegawai BPMP Provinsi Riau





Gambar 1. 2 Wilayah Kerja BPMP Provinsi Riau

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan BPMP;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan BPMP;

9. Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 – 2024;
10. Rencana Strategis BPMP Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024;
11. Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2023.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi BPMP Provinsi Riau

TUGAS

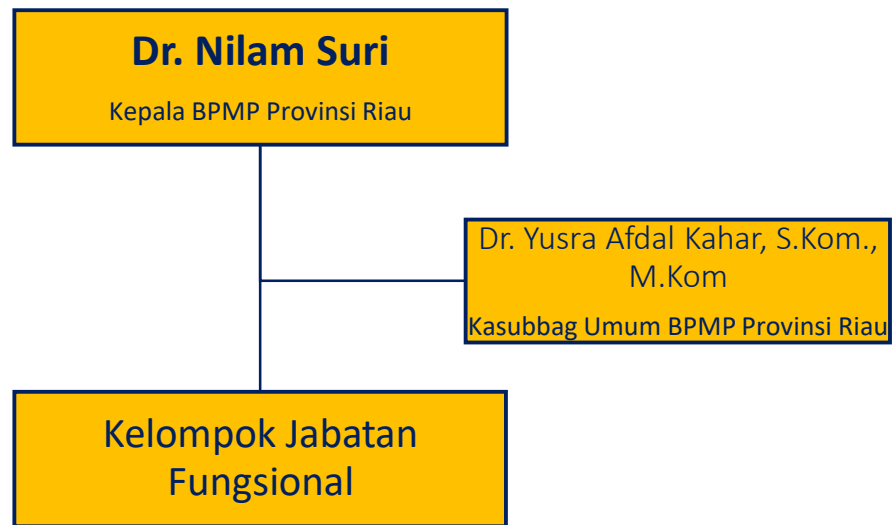
melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

FUNGSI

- pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- pelaksanaan urusan administrasi.

Gambar 1. 4 Tugas dan Fungsi BPMP Provinsi Riau

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, BPMP Provinsi Riau memiliki struktur organisasi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022. Berikut struktur organisasi BPMP Provinsi Riau :



Gambar 1. 5 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Riau

Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Isu-Isu Strategis

- Masih terdapat satuan pendidikan yang belum melaksanakan Asesmen Nasional
- Komitmen pemangku kepentingan belum maksimal dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak
- Masih terdapat satuan pendidikan yang belum memanfaatkan Rapor pendidikan untuk Perencanaan Berbasis Data (PBD)
- Masih terdapat satuan pendidikan yang melaksanakan Calistung sebagai syarat dalam PPDB

Peran Strategis

- Meningkatkan kemitraan dengan Pemda dan Mitra lainnya dalam hal kebijakan dan penganggaran untuk Penjaminan Mutu Pendidikan
- Penguatan manajemen dan tata kelola lembaga melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Mengembangkan kompetensi pegawai sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan Tusi

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Visi BPMP Provinsi Riau

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Riau menetapkan visi berdasarkan pada visi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045 dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan. Adapun visi dan misi BPMP Provinsi Riau 2020-2024 adalah:

BPMP Provinsi Riau mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Masyarakat Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

B. Misi BPMP Provinsi Riau

Untuk mendukung terwujudnya visi BPMP Provinsi Riau, adapun misi BPMP Provinsi Riau sebagai berikut :

- 1. Mendukung terwujudnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan di provinsi Riau;*
- 2. Mengoptimalkan peran serta serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat.*

C. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis BPMP Provinsi Riau berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
2. Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

D. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan, BPMP Provinsi Riau menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun anggaran (2020 – 2024) terdiri dari sasaran, indikator, dan target LPMP Provinsi Riau pada tahun 2020 dan 2021 serta sasaran, indikator, dan target BPMP Provinsi Riau pada tahun 2022 – 2024. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja LPMP Provinsi Riau 2020 – 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	
			2020	2021
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan			
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,5	27,4
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	5
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95	95,2
SK 2	Meningkatnya Tata Kelola LPMP Provinsi Riau			
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Riau	Predikat	BB	BB
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L LPMP Provinsi Riau	Nilai	81	82

LPMP Provinsi Riau memiliki 2 Sasaran Kegiatan dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan. Setelah restrukturisasi lembaga menjadi BPMP Provinsi Riau berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022, terdapat perubahan sasaran dan indikator menjadi 2 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja BPMP Provinsi Riau 2022 – 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0.98	1.96	3.92
IKK 1.2	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25	30	35
SK 2	Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Riau				
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	Predikat	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau	Nilai	83	84	85

E. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Riau merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	[SK 1] Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2.	[SK 2] Meningkatkan tata kelola BPMP Provinsi Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau	84

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 10.656.077.000
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 16.545.771.000
	TOTAL	Rp. 27.201.848.000

Kemudian dari perjanjian kinerja tersebut, terjadi revisi DIPA sebanyak 2 kali, berupa pengurangan anggaran yang diatur melalui Sistem Penganggaran di Unit Utama Eselon I Kemendikbudristek pada pos Belanja Pegawai yang merupakan bagian dari kode kegiatan 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Belanja Barang yang tersebar tidak hanya di Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, namun juga dari kode kegiatan 6397 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas.

Perubahan alokasi anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 8.459.995.000
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 16.027.967.000
	TOTAL	Rp. 24.487.962.000

Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, BPMP Provinsi Riau menetapkan program prioritas untuk tahun anggaran 2023, antara lain:

1. Pelaksanaan pembinaan kurikulum merdeka;
2. Pelaksanaan pembinaan asesmen nasional;
3. Pelaksanaan pembinaan transfer daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan sekolah penggerak;
5. Pelaksanaan pembinaan perencanaan berbasis data;
6. Pelaksanaan pembinaan kemitraan;
7. Pelaksanaan pembinaan digitalisasi sekolah.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, BPMP Provinsi Riau menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	1,96	2,57	131,12
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	30	84,62	282,06
Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	A	A	100
Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau	84	95,97	114,25

B. Capaian Kinerja

a. Sasaran Kegiatan 1 (Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen)

1. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah Provinsi Riau yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil akreditasi.

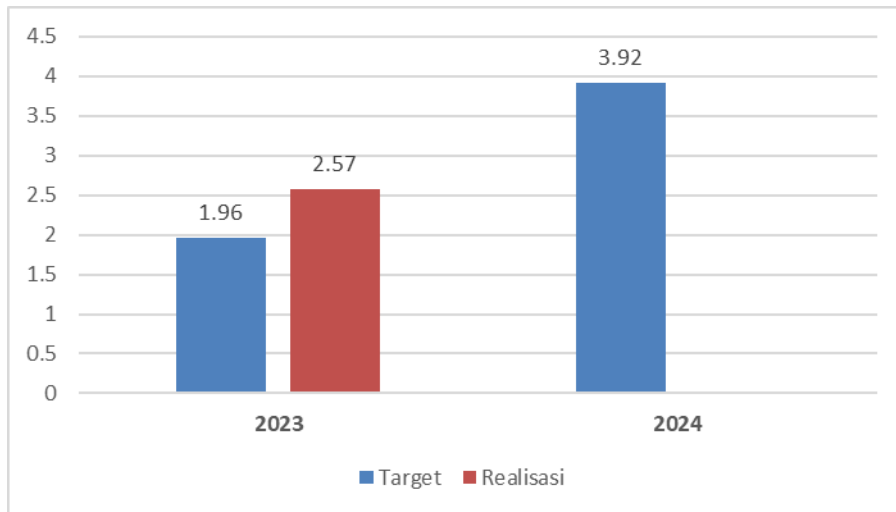
Tabel 3. 2 Capaian IKK persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian				Target Renstra 2024	% Capaian Renstra 2024
			2022	2023	Selisih	%		
1.1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1,96	16,27	18,83	2,57	130,98	3.92	81

Sumber : Data Akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember) 2023

Dari target 30%, tercapai 18,83% sehingga ketercapaian target IKK ini sebesar 130,98%. Penilaian berdasarkan persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2022 ke TA 2023 yang dilihat dari nilai akreditasi dan capaian kinerja TA 2023. Pada tahun 2022 kenaikan mutu pembelajaran adalah 16,27% dan pada tahun 2023 kenaikannya mencapai 18,83%. Pada tahun 2023 jumlah satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) di Provinsi Riau yang terakreditasi sebanyak 3,193 satuan pendidikan. Capaian peningkatan mutu pembelajaran (PAUD Dikmas) tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 2,57% dibandingkan tahun 2022 yang hanya berjumlah 2,703 satuan pendidikan. Capaian ini telah memenuhi 65,56% dari target IKK di tahun 2024.

Grafik 3. 1 Capaian Persentase Satuan Pendidikan (Paud Dan Dikmas) Yang Meningkatkan Mutu Pembelajarannya



Untuk mencapai target kinerja IKK 1.1. ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yaitu:

- a. Pendampingan Penguatan Transisi PAUD – SD;
- b. Monev Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat;
- c. Bimtek Operator Pengangkatan GP menjadi KS-PS;
- d. Refleksi Komunitas Belajar Intra Sekolah dalam bentuk FGD;
- e. Pendampingan Percepatan Pelaporan Dana BOP TA 2023;
- f. Sosialisasi Pemanfaatan Platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan Satpen;
- g. ToT Penggunaan dan Pemanfaatan Platform SDS utk Peningkatan Adopsi ARKAS & SIPLah;
- h. Pendampingan Pemanfaatan Platform SDS (ARKAS dan SIPLAH) Bagi Satuan Pendidikan Tahap II;
- i. Kegiatan Refleksi dan Evaluasi Komunitas Belajar;
- j. Advokasi Akses Rapor Pendidikan bagi Pemda di Provinsi Riau;
- k. Monev Implementasi PBD di Satuan Pendidikan Rincian program dan kegiatan terlampir.

Strategi mencapai target kinerja IKK 1.1. ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yaitu:

- a. secara periodik melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota untuk melakukan kegiatan, baik secara daring maupun luring. Koordinasi secara daring

- dilakukan melalui kegiatan PMO, dan koordinasi secara luring dilakukan melalui kunjungan ke daerah;
- secara periodik melakukan koordinasi dengan Mitra Pembangunan dalam hal ini Tanoto Foundation yang sudah bekerjasama dengan 5 Kab/Kota di Provinsi Riau;
 - melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan UPT Kemendikbudristek lainnya di Provinsi Riau;
 - memperbarui dan memantau pergerakan data di berbagai aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek.

Kendala dan hambatan mencapai target kinerja IKK 1.1. ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yaitu diantaranya:

- Komunitas Belajar yang sudah berjalan di sekolah IKM banyak yang masih berupa Kombel Antar Sekolah dan Kombel Daring, bukan Kombel Intra Sekolah yang berfokus pada permasalahan peserta didik
- Peserta pendampingan pemanfaatan Platform SDS (ARKAS dan SIPLAH) tidak mengikuti jadwal sesuai Sesi dan terdapat sekolah yang jaraknya jauh sehingga tidak hadir.

Tindak lanjut dan langkah antisipasi :

- Menghimbau kepada sekolah IKM untuk membentuk Kombel Intra Sekolah dan membuat kegiatan berdasarkan permasalahan peserta didik dan melaporkan kegiatan ke dalam tautan yang sudah diberikan
- Membuat RTL dan menghimpun permasalahan yang sering terjadi di Kab/Kota terkait pemanfaatan platform SDS

2. Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah persentase dari Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya. Dimana nilainya dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dengan Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya Beserta Penjelasan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Realisasi/ Capaian		selisih	% Capaian
		2022	2023		
1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	100	84,62	-15,38	232,07

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan Dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra Beserta Penjelasan Indikator Kinerja

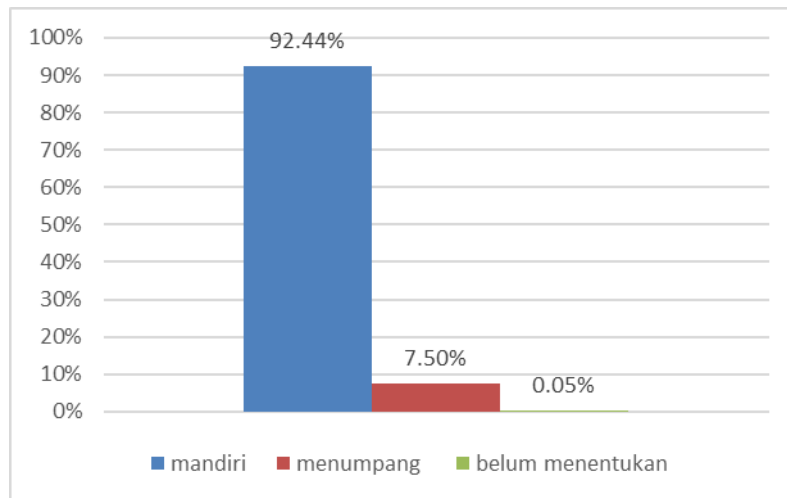
Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Target Renstra 2024	% Capaian Renstra 2024
	Target	Realisasi	% Capaian		
1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	84,62	282,07	35	400

Pengukuran IKK 1.2 terkait erat dengan upaya memfasilitasi satuan pendidikan untuk meningkatkan kinerjanya, pelaksanaan AN dan PSP, Data Mutu Pendidikan yang terbaru dan valid, serta kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disosialisasikan dengan baik dan diterima dengan optimal oleh seluruh stakeholder pendidikan di Provinsi Riau. Adapun kegiatan pendukung yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

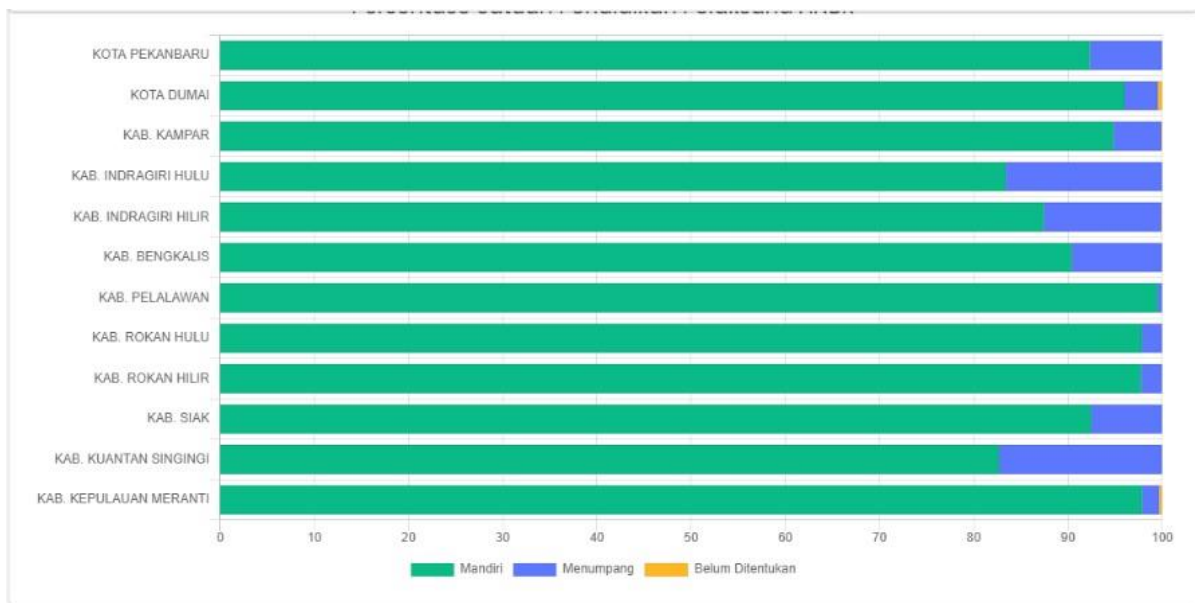
1. Pendampingan Kebijakan Kemdikbudristek terkait pelaksanaan asesmen nasional

Asesmen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional di Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 99,99% dengan rincian 92,44% melaksanakan secara mandiri, 7,5% secara menumpang dan masih terdapat 0,05% yang masih belum menentukan.

Grafik 3. 2 Satuan Pendidikan Pelaksana Asesmen Nasional Tahun 2023 Provinsi Riau



Grafik 3.3. Satuan Pendidikan Pelaksana Asesmen Nasional Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota



Peningkatan capaian rapor pendidikan di atas target ini berkat program penguatan internal maupun eksternal satuan pendidikan terhadap indikator-indikator rapor pendidikan yang nilainya masih rendah. Selain itu Pemerintah daerah provinsi Riau memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan kepada satuan pendidikan dalam menganalisis rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data sehingga satuan pendidikan mampu menganalisis lebih akurat terhadap rapor pendidikan.

Namun demikian, tetap ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya. Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tersebut antara lain:

- a. Perbedaan antara data saat penetapan status pelaksanaan dengan saat pelaksanaan AN karena masih terjadi perubahan data walaupun sudah ditetapkan sebelumnya;
- b. Minimnya anggaran untuk ANBK sehingga proses pelaksanaan AN mulai dari Simulasi sampai ke pelaksanaan (Simulasi, Gladi dan Monev Pelaksanaan) hanya dapat dilaksanakan di jenjang sekolah dasar;
- c. Posko ANBK tingkat Kabupaten/Kota belum melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan POS ANBK;
- d. Banyak ajuan permasalahan di web ANBK yang tidak ditanggapi oleh pengelola web;
- e. Masih banyak satuan pendidikan yang kesulitan dalam akses internet saat pelaksanaan AN ; dan
- f. Masih ada satuan pendidikan yang menumpang dengan yang akan ditumpanginya pada pelaksanaan AN jaraknya berjauhan.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota lebih awal dalam persiapan pelaksanaan asesmen nasional, penetapan status pelaksanaan asesmen, penentuan distribusi sekolah menumpang dan pelaksanaan simulasi, gladi bersih dan pelaksanaan asesmen utama;
- b. Menganggarkan secara tepat sehingga dapat melaksanakan kegiatan ANBK di semua jenjang;
- c. Advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendata sekolah yang mengalami kesulitan akses internet dan jarak yang berjauhan untuk segera dapat dicarikan sekolah menumpanginya yang internetnya bagus serta jarak yang tidak terlalu jauh.

3. Indikator Kegiatan 2.1. Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau

a. Penjelasan Singkat Definisi Operasional Indikator Kinerja

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau diperoleh melalui akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Cara perhitungan indikator kinerja

[30% x Perencanaan Kinerja] + [30% x Pengukuran kinerja] + [15% x Pelaporan Kinerja] + [25% x Evaluasi Kinerja]

b. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun Berjalan Beserta Penjelasan Indikator Kinerja.

Tabel 3. 5 Target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan indikator kinerja.

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Penjelasan
Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	Predikat	A	A	Tercapainya predikat A pada LAKIN BPMP Provinsi Riau Tahun 2023 berdasarkan lembar Hasil Evaluasi Instansi Pemerintah oleh Itjen Kemdikbudristek

c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dengan Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya Beserta Penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dengan Capaian Kinerja Tahun- Tahun Sebelumnya Beserta Penjelasan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		
		2021	2022	2023
Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	Predikat	81,17 (A) Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel	84,00 (A) Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel	88.8 (A) Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel

d. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja.

Tabel 3.8. Realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra beserta penjelasan indikator kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		Penjelasan
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	Predikat	BB	A	A	A	A	A	Tercapainya predikat A pada LAKIN BPMP Provinsi Riau Tahun 2023 berdasarkan lembar Hasil Evaluasi Instansi Pemerintah oleh Itjen Kemdikbud ristek

a. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Realisasi Target Indikator Kinerja

Untuk mendukung realisasi target kinerja IKK, maka BPMP Riau melakukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di 4 Pokja, kelompok jabatan fungsional dan kelompok ketatausahaan. Rincian program dan kegiatan terlampir.

b. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja

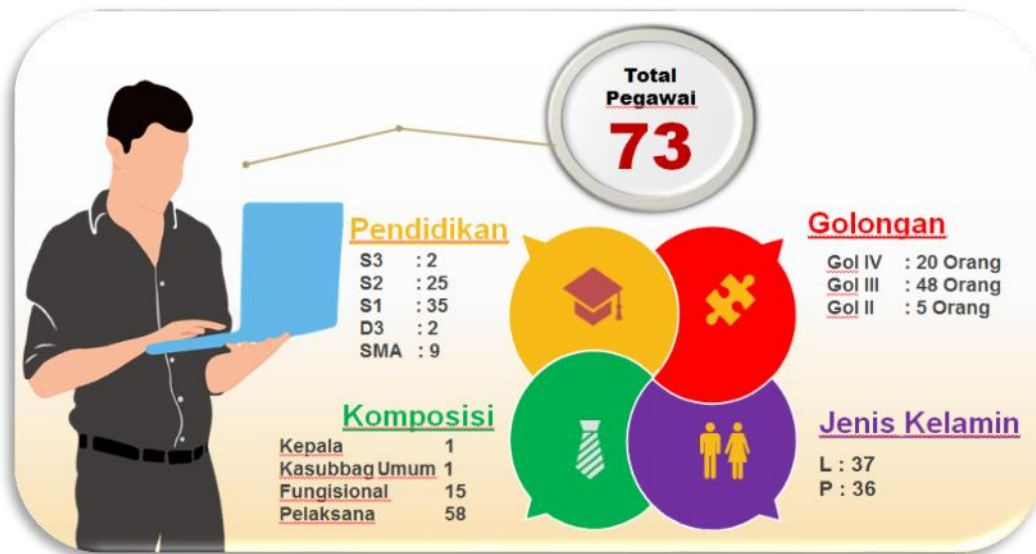
Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian target dari indikator BPMP Provinsi Riau adalah :

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

1) PNS

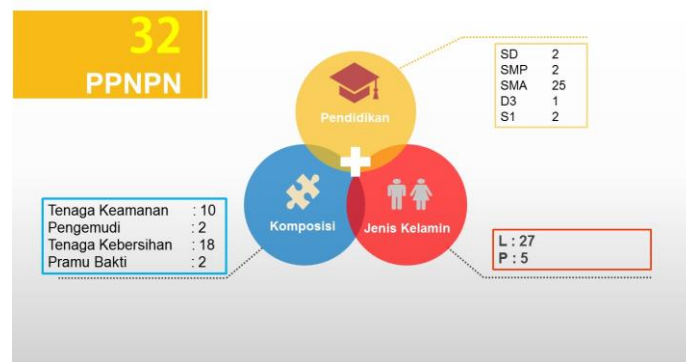
Gambar 3. 1 Keadaan PNS BPMP Provinsi Riau Tahun 2023



Disamping Pendidikan formal yang sudah dimiliki oleh pegawai mereka juga dilatih dalam berbagai kegiatan untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya sehingga dapat mendukung penyelesaian setiap target kerja yang diberikan kepada instansi.

2) Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Gambar 3. 2 Keadaan PPNPN BPMP Provinsi Riau Tahun 2023



Tenaga PPNPN yang membantu kebersihan, pengemudi, dan keamanan instansi dengan jumlah 32 orang, ini sangat membantu dalam mendukung keberhasilan target instansi dalam pencapaian indikator tatakelola.

b. Konsultan Pendamping Penjaminan Mutu

BPMP Provinsi Riau memiliki konsultan pendamping penjaminan mutu sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Kemendikbudristek.

c. Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap SDM memahami dan mengetahui tugas serta tanggung jawab masing-masing sehingga dalam menyelesaikan suatu tugas dan kegiatan yang dipercayakan kepada mereka dapat dikerjakan sesuai dengan kewenangannya dan saling bekerjasama dalam setiap Pokja.

d. Hubungan Kerja

Kerjasama antar setiap karyawan terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta kolaborasi dalam penyelesaian pekerjaan yang diberikan kepada instansi.

e. Sarana dan Prasarana

Dalam pencapaian target indikator kinerja Instansi maka BPMP Provinsi Riau melengkapi semua kebutuhan yang harus ada untuk menyelesaikan setiap kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

f. Komitmen Pegawai dan Pimpinan

Adanya komitmen semua ekosistem di instansi yang bersama-sama akan melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan target per triwulan sesuai dengan kewenangannya dan mengedepankan kerjasama.

g. Keterlibatan Pimpinan

Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan selalu terlibat dalam pengawasan dan evaluasi.

h. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan semua indikator kinerja instansi terdapat pengawasan dari pimpinan dan tim SPI serta dilakukan evaluasi agar target kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

2. Faktor Eksternal

- a. Kerjasama yang baik dengan semua *stakeholder* yang terkait dengan pendidikan;
- b. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian suatu kegiatan;
- c. Komunikasi yang efektif dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan kerjasamakegiatan.

c. Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan dalam pencapaian kinerja tata kelola lembaga diantaranya:

1. rapat internal membahas capaian kinerja lembaga tidak selalu bisa dilakukan pada awal minggu setiap bulannya karena jadwalnya sering bersamaan dengan jadwal kegiatan BPMP Provinsi Riau yang lain terutama pada Triwulan III dan IV.
2. Instruksi pada kegiatan O2SN, FLS2N, OSN dan GSI tidak ada perintah langsung dari Seditjen PDM, serta di juknis yang diterbitkan oleh Puspresnas (BPTI) masih sebatas koordinasi. Pelaksana kegiatan tersebut adalah Disdikprov, namun Disdikprov juga merasa tidak berwenang, karena bukan pembina SD dan SMP lagi. Sementara di kab/kota tidak tahu tindaklanjut pemilihan atlet tingkat provinsi yang akan berlaga di tingkat nasional. Akibatnya perencanaan anggaran terkait kegiatan tersebut belum maksimal;
3. pada kegiatan Diseminasi Hasil Program Penjaminan Mutu Pendidikan terkait kehadiran peserta, tidak semua kepala dinas pendidikan hadir sesuai yang diharapkan.

d. Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja.

Langkah yang dilakukan untuk antisipasi hambatan dan permasalahan dalam pencapaiantarget kinerja antara lain:

1. Meluangkan waktu untuk melakukan rapat internal membahas capaian kinerja baik dilakukan secara luring maupun daring;
2. Melaksanakan kegiatan O2SN, FLS2N, OSN dan GSI sesuai prosedur, mulai dari tingkat provinsi sampai TC dan pengiriman ke tingkat nasional dengan revisi RKA/KL BPMP Prov. Riau;
3. Memberikan bahan paparan dan video rekaman kegiatan untuk seluruh peserta yang mewakili agar menyampaikan kepada pengambil kebijakan di Provinsi dan Kab/Kota.

e. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah :

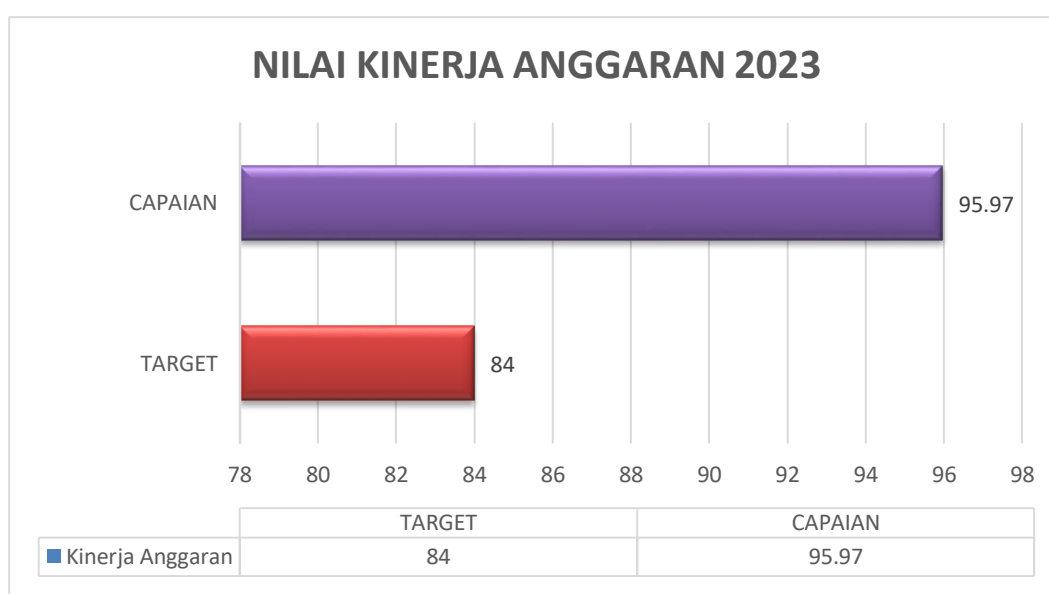
1. Memperbaiki penyusunan jadwal sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dalam waktu bersamaan;
2. Mengusulkan alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan O2SN, FLS2N, OSN dan GSI;
3. Mengadvokasi Pemerintah Daerah tentang pentingnya program-program Kemendikbudristek dalam peningkatan mutu pendidikan.

4. Indikator Kegiatan 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau

a. Penjelasan Singkat Definisi Operasional Indikator Kinerja

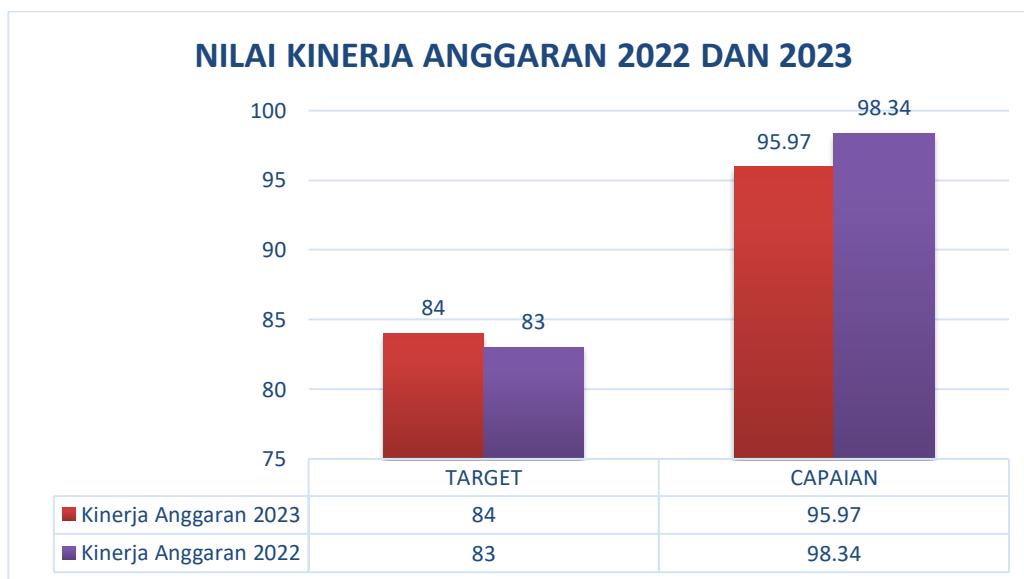
Menurut Perjanjian Kinerja Kepala pada IKK 2.2 yaitu tentang Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA/KL, pada pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 ini BPMP Provinsi Riau telah meraih nilai yang **jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan** yaitu dari target sebesar 84 dengan nilai capaian 95,97.

Grafik 3. 3 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L



b. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Dengan Tahun Anggaran Sebelumnya Ditampilkan Pada Grafik Berikut:

Grafik 3. 4 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran



Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran. Nilai Kinerja Anggaran berasal dari 2 komponen berikut:

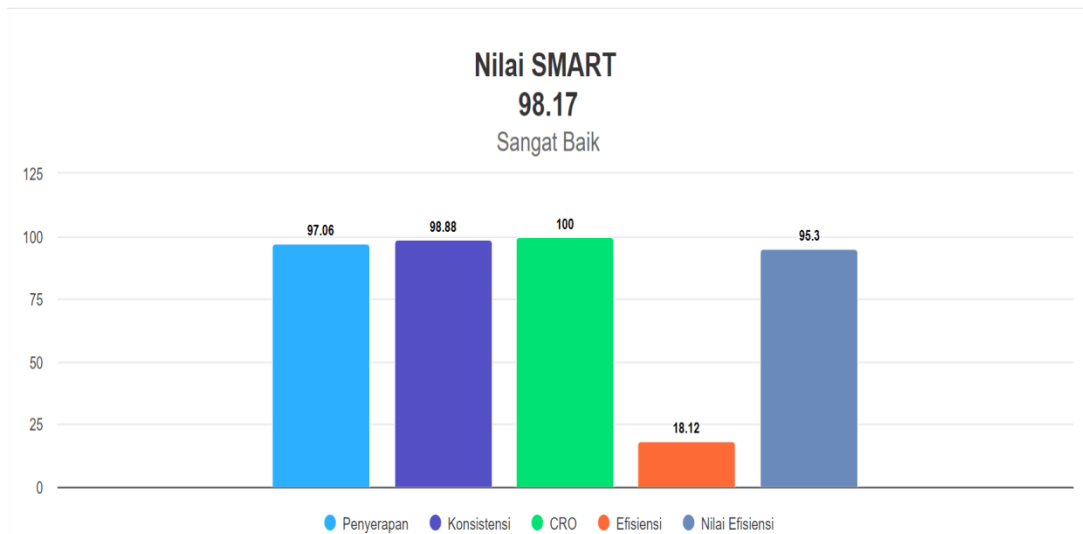
1. Nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dengan bobot sebesar 60%

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja Anggaran. Untuk tahun 2022 BPMP Provinsi Riau mencapai nilai Evaluasi Kinerja Anggaran sebesar 98,17.

Nilai evaluasi kinerja Anggaran bersumber dari :

- a. penyerapan anggaran, dengan capaian nilai 97,06;
- b. konsistensi, dengan capaian nilai 98,88;
- c. capaian output, dengan capaian nilai 100;
- d. efisiensi, dengan capaian nilai 18,12;
- e. nilai efisiensi 95,3.

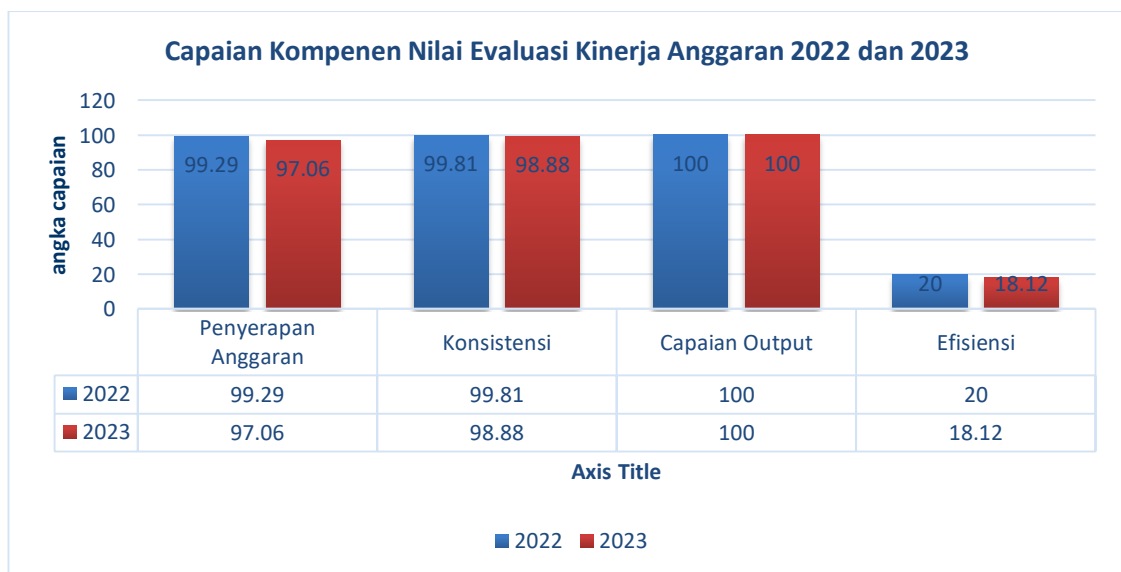
Grafik 3. 5 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran



sumber : smart.kemenkeu.go.id

Perbandingan capaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) tahun anggaran 2023 dan 2022 disampaikan pada grafik berikut:

Grafik 3. 6 Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Tahun Anggaran 2023 Dan 2022



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot sebesar 40%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/Lembaga. Untuk tahun 2023 BPMP Provinsi Riau meraih nilai IKPA sebesar 92,67 yaitu dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Indikator Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023

No	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	100.00	10	10.00
2	Deviasi Halaman III DIPA	68.65	10	6.87
3	Penyerapan Anggaran	79.84	20	15.97
4	Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
5	Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
6	Pengelolaan UP dan TUP	98.33	10	9.83
7	Dispensasi SPM	100.00	5	5.00
8	Capaian Output	100.00	25	25.00
	Nilai IKPA		92.67	

sumber: spanint.kemenkeu.go.id

Deviasi Halaman III DIPA bernilai 6,87 dari bobot 10 dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan rencana pencairan dana sehingga harus dilakukan revisi pada halaman III DIPA.

Strategi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Riau dalam peningkatan nilai kinerja anggaran adalah:

- a. melakukan optimalisasi anggaran, yaitu melaksanakan program utama dengan menggunakan anggaran secara maksimal kemudian melakukan penyesuaian anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung program tersebut;
- b. melaksanakan semua prosedur penilaian EKA dan IKPA sesuai dengan ketentuan penilaian, semua indikator dilaksanakan dengan maksimal agar nilai yang didapat maksimal;
- c. perencanaan penarikan dana disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah disusun sehingga dapat mengurangi tingkat deviasi halaman III DIPA.

Hambatan dalam capaian nilai kinerja anggaran adalah:

1. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal yang direncanakan pada rapat kerja awal tahun anggaran karena adanya beberapa kebijakan khusus terkait kegiatan tersebut.
2. Solusi dari hambatan dalam capaian nilai kinerja anggaran adalah:
3. Mengoptimalkan koordinasi secara internal antar Pokja dan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP-DIPA 023.03.2.419526/2023 Tanggal 30 November 2022 BPMP Provinsi Riau memiliki anggaran sebesar Rp27.201.840.000,00. Hingga periode 31 Desember 2023 BPMP Provinsi Riau telah melakukan revisi anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Revisi I
Revisi ini disahkan pada tanggal 29 Desember 2022 yang merupakan revisi Blokir Automatic Adjustment dari Pusat. Revisi ini tidak merubah jumlah anggaran yaitu tetap seperti DIPA Awal yang berjumlah Rp27.201.840.000,00. Revisi hanya terkait penyesuaian pada kegiatan tanpa merubah besaran anggaran.
2. Revisi II
Revisi ini disahkan pada tanggal 10 Maret 2023 yang merupakan revisi Blokir Automatic Adjustment dari Pusat. Revisi ini tidak merubah jumlah anggaran yaitu tetap seperti DIPA Awal yang berjumlah Rp27.201.840.000,00. Revisi hanya terkait penyesuaian pada kegiatan tanpa merubah besaran anggaran.
3. Revisi III
Revisi ini disahkan pada tanggal 17 April 2023 yang merupakan revisi rencana penarikan dana (Revisi Halaman III DIPA), yaitu perubahan besaran rencana penarikan bulan Januari s.d. Maret yang disesuaikan dengan realisasi anggaran Triwulan I dan penyesuaian rencana penarikan bulan April s.d. Desember disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Atas revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pada nilai Pagu DIPA.
4. Revisi IV
Revisi ini disahkan pada tanggal 13 Juli 2023 merupakan revisi rencana penarikan dana (Revisi Halaman III DIPA), yaitu perubahan besaran rencana penarikan bulan Januari s.d. Maret yang disesuaikan dengan realisasi anggaran Triwulan I dan penyesuaian rencana penarikan bulan April s.d. Desember disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Atas revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pada nilai Pagu DIPA.
5. Revisi V
Revisi ini disahkan pada tanggal 18 Juli 2023 merupakan revisi pengurangan jumlah Pagu DIPA dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp517.804.000.

Pengurangan anggaran pada Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Revisi Belanja Pegawai

Jenis Belanja	Semula	Menjadi
Belanja Pegawai (51)	Rp 10.291.246.000,00	Rp 9.773.442.000,00

Revisi ini merupakan revisi rencana penarikan dana (Revisi Halaman III DIPA), yaitu perubahan besaran rencana penarikan bulan Juli s.d. September yang disesuaikan dengan realisasi anggaran Triwulan II.

6. Revisi VI

Revisi ini disahkan pada tanggal 11 Agustus 2023 tidak mengakibatkan perubahan pada nilai Pagu DIPA. Revisi ini tidak mengubah nilai anggaran per belanja, revisi dilakukan untuk penyesuaian anggaran kegiatan dan rencana penarikan dana.

7. Revisi VII

Revisi ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 2023 tidak mengakibatkan perubahan pada nilai Pagu DIPA. Revisi ini tidak mengubah nilai anggaran per belanja, revisi dilakukan untuk penyesuaian anggaran kegiatan dan rencana penarikan dana.

8. Revisi VIII

Revisi ini disahkan pada tanggal 27 September 2023 tidak mengakibatkan perubahan pada nilai Pagu DIPA. Revisi ini tidak mengubah nilai anggaran per belanja, revisi dilakukan untuk penyesuaian anggaran kegiatan dan rencana penarikan dana.

9. Revisi IX

Revisi ini disahkan pada tanggal 10 Oktober 2023, revisi ini mengubah jumlah anggaran yaitu anggaran yang semula berjumlah Rp27.201.840.000,00 berkurang menjadi Rp24.487.962.000,00 atau dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Revisi Anggaran

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Menjadi
Belanja Pegawai (51)	Rp9.773.442.000,00	Rp9.773.442.000,00
Belanja Barang (52)	Rp 16.860.602.000,00	Rp14.664.520.000,00
Belanja Modal (53)	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
Jumlah	Rp27.201.840.000,00	Rp24.487.962.000,00

10. Revisi X

Revisi ini disahkan pada 21 November 2023 revisi ini tidak mengubah jumlah anggaran secara keseluruhan, revisi hanya dilakukan untuk penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

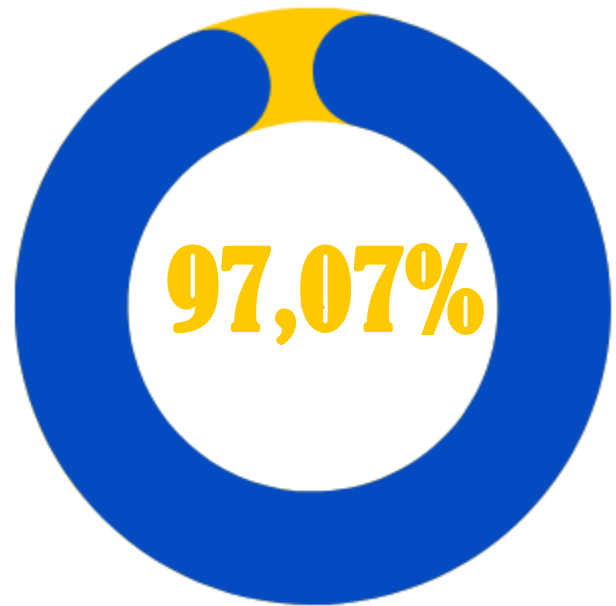
11. Revisi XI

Revisi ini disahkan pada 30 November 2023 revisi ini tidak mengubah jumlah anggaran secara keseluruhan, revisi hanya dilakukan untuk penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

12. Revisi XII

Revisi ini disahkan pada 20 Desember 2023, revisi ini merupakan revisi pemutakhiran KPA, revisi ini tidak mengubah jumlah anggaran secara keseluruhan, revisi hanya dilakukan untuk penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

Hingga akhir tahun
2023 realisasi anggaran
BPMP Provinsi Riau
adalah sebesar
Rp23.766.793.864,00
atau mencapai **97,07%**
dari alokasi anggaran
sebesar
Rp24.487.962.000,00.



Grafik 3. 7 Persentasi Realisasi Anggaran BPMP
Prov. Riau Tahun 2023

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2023

Jenis Belanja	31 Desember 2023		% Real. Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	9.773.442.000	9.308.730.586	95,25%
Belanja Barang	14.664.520.000	14.411.019.278	98,27%
Belanja Modal	50.000.000	49.549.000	99,10%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Realisasi Belanja Kotor	24.487.962.000	23.769.298.864	97,07%
Pengembalian Belanja	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	24.487.962.000	23.769.298.864	97,07%

Jika dibandingkan dengan 31 Desember TA 2022, Realisasi Belanja pada 31 Desember TA 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.947.031.037,00 atau **14,15%**.

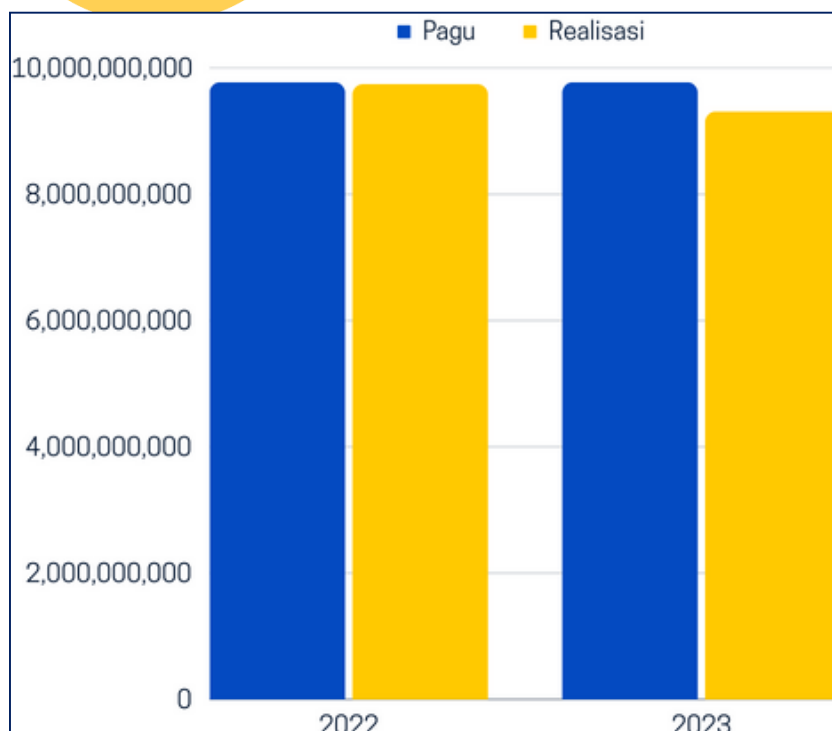
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	
Belanja Pegawai	9.308.730.286	9.743.828.625	-4,47%
Belanja Barang	14.408.514.278	11.025.934.702	30,68%
Belanja Modal	49.549.000	49.999.200	-0,90%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah Realisasi Belanja	23.766.793.564	20.819.762.527	14,15%

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar 435.098.039,00 atau **4,47%** dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya 3 orang pegawai yang pensiun pada tahun 2023.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun	
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Jumlah	%
9,773,442,000	9,743,828,625	99.70	9,773,442,000	9,308,730,286	95.25	- 435,098,339	-4.47

Grafik 3. 8 Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.408.514.278,00 dan Rp11.025.934.702,00. Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.382.579.576,00 atau 30,68% dibandingkan realisasi belanja barang pada tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi belanja barang ini antara lain disebabkan oleh:

1. Kenaikan jumlah anggaran belanja barang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID 19 yang semakin terkendali, sehingga kegiatan secara luring bisa dilaksanakan baik berupa kegiatan Coaching Clinic dan Workshop di aula dinas pendidikan, sekolah dan hotel di kab/kota serta kegiatan pendampingan di kabupaten/kota.

2. Selain itu dengan adanya SOTK yang baru, sasaran kinerja BPMP Provinsi Riau selain jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun bertambah dengan jenjang PAUD, sehingga menambahkan jumlah kegiatan baru.

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Realisasi Belanja Barang Terhadap Pagu TA. 2023 dan 2022

Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun	
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Jumlah	%
11.144.524.000	11.025.934.702	98,94	14.664.520.000	14.408.514.278	98,25	3.382.579.576	30,68

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp49.549.000,00 dan Rp49.999.200,00. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp450.200,00 atau 0,90% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Realisasi Belanja Modal Terhadap Pagu TA. 2023 Dan 2022

Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun	
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Jumlah	%
50.000.000	49.999.200	99,998	50.000.000	49.549.000	99,10	- 450.200	-0,90

Alokasi Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk memenuhi target dari Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau pada tahun 2023, maka dialokasikan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Output	Capaian Output
IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	7.370.158.000,00	7.323.046.380,00	99,36	1,96	2,57
IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	1.035.837.000	1.031.164.870	99,55	30	84,62
IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	375.000.000	370.530.725	98,81	A	A
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	15.602.967.000	14.995.007.889	96,10	84	95,97

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023 BPMP Provinsi Riau telah melakukan efisiensi anggaran sebagai berikut:

1. Program Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya. Target capaian yang ditetapkan adalah 5.555 lembaga dan telah direalisasikan capaiannya berjumlah 6.226 lembaga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Tabel 3. 15 Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Program	2023				Capaian Output Tambahan	% Efisiensi
	Anggaran	Realisasi	Target Capaian Output	Capaian Output		
Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	7.424.158.000	7.323.046.380	5555 lembaga	6226 lembaga	671 lembaga	12,08

Pada tahun ini capaian realisasi efisiensi anggaran yang melebihi target sebesar 671 lembaga yang terdiri dari Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Riau. Persentase efisiensi mencapai 12,08%. Efisiensi ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan secara daring dan optimalisasi biaya perjalanan dinas.

2. Program Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya. Target yang ditetapkan pada DIPA adalah 4.852 lembaga dengan anggaran sebesar Rp1.035.837.000. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Program	2023				Capaian Output Tambahan
	Anggaran	Realisasi	Target Capaian Output	Capaian Output	
Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	1.035.837.000	1.031.164.870	4852 lembaga	4878 lembaga	26 lembaga

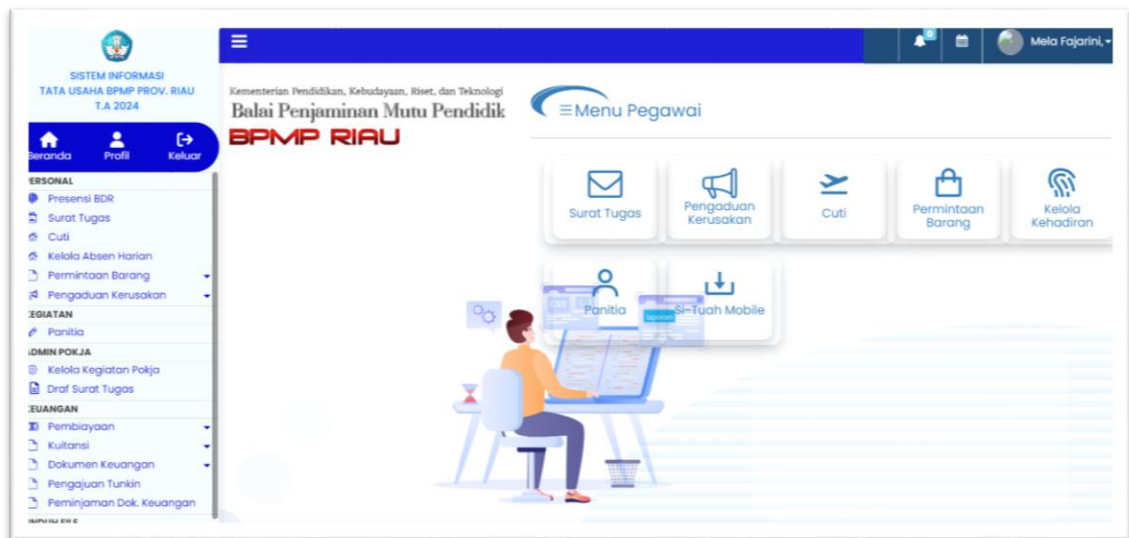
Pada tahun ini capaian realisasi efisiensi anggaran yang melebihi target sebesar 26 lembaga yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kab/Kota Provinsi Riau. Efisiensi ini dapat dilaksanakan dengan melakukan optimalisasi biaya perjalanan dinas.

D. Inovasi, Penghargaan, Dan Program *Crosscutting / Collaborative*

1. Inovasi

BPMP Provinsi Riau melakukan inovasi dengan mengembangkan aplikasi SITUAH dalam pengelolaan dan pengadministrasian dokumen keuangan sehingga menunjang program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digagas oleh pemerintah pusat.

Gambar 3. 3 Tampilan halaman depan aplikasi SITUAH



Berikut fitur yang ada pada aplikasi SITUAH bagian Keuangan:

a. Pembiayaan

Pada submenu ini pengadministrasi keuangan dapat membuat usulan pembiayaan sesuai dengan surat tugas yang telah dikeluarkan pada user admin kepegawaian.

Gambar 3. 4 Tampilan submenu pembiayaan dalam aplikasi SITUAH

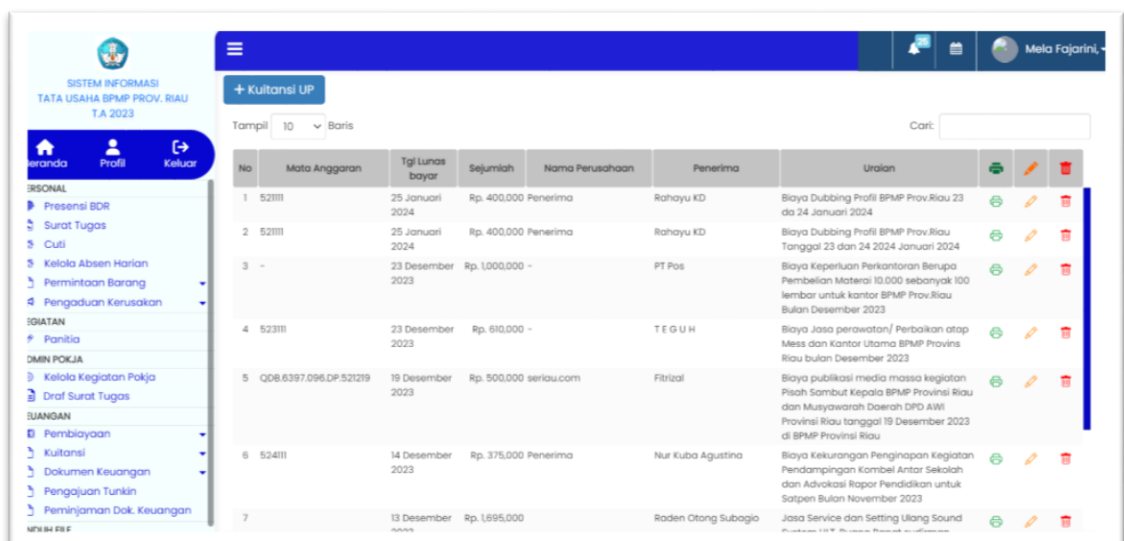


Act	No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian Kegiatan	Dari Tanggal	Sampai Tanggal
000	1	013/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-25	mengikuti kegiatan Audiensi Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Dinas Pendidikan Kota Dumai	2024-01-26	2024-01-27
000	2	00/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-23	melaksanakan Daring Profil BPMP Provinsi Riau	2024-01-23	2024-01-24
000	3	012/C7.8/KU-SPD/2023	2024-01-23	mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	2024-01-25	2024-01-26
000	4	011/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-23	survey tempat kegiatan Ikcar dan Sinkronisasi Program Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	2024-01-25	2024-01-27
000	5	00/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-17	Pengurusan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	2024-01-18	2024-01-18
000	6	00/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-15	melaksanakan kegiatan Mediasi	2024-01-15	2024-01-15
000	7	007/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-17	mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2024	2024-01-18	2024-01-20
000	8	006/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-15	mengikuti kegiatan Konsultasi Publik	2024-01-17	2024-01-18
000	9	005/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-12	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan BPMP Provinsi Riau terkait Pelaksanaan KMB	2024-01-16	2024-01-17
000	10	/	2024-01-11	Menghadiri Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Pekanbaru Tahun 2025-2045	2024-01-12	2024-01-12
000	11	004/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-09	mengikuti acara Pembukaan Rancangan Awal Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	2024-01-10	2024-01-10
000	12	002/C7.8/KU-SPD/2024	2024-01-02	mengikuti Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024	2024-01-03	2024-01-06

b. Kuitansi

Pada submenu ini membantu pengadministrasi keuangan untuk membuat kuitansi pembiayaan yang berasal dari Uang Persediaan

Gambar 3. 5 Tampilan submenu kuitansi pada aplikasi SITUAH

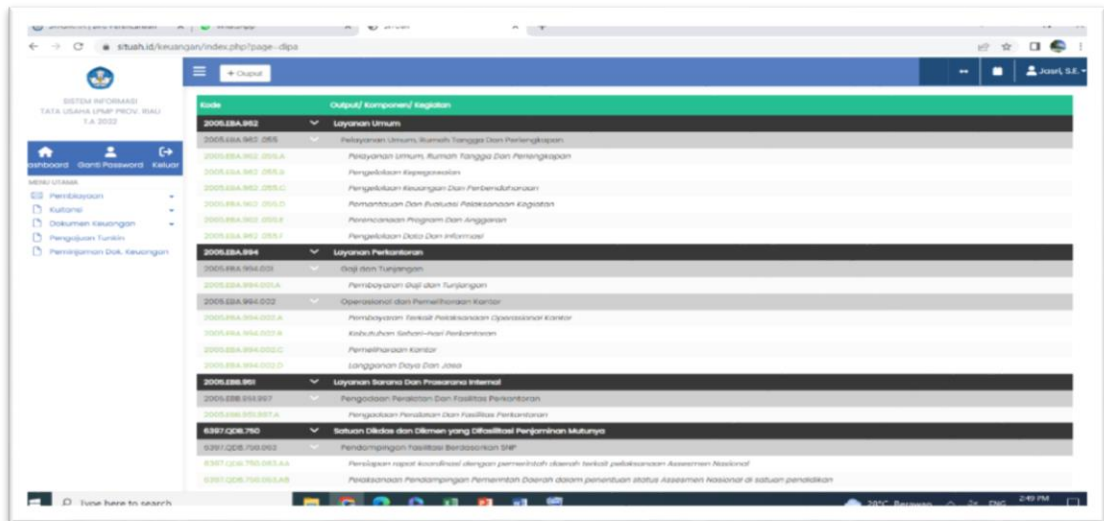


No	Mata Anggaran	Tgl Lunas bayar	Sejumlah	Nama Perusahaan	Penerima	Uraian
1	52111	25 Januari 2024	Rp. 400,000	Penerima	Rahayu KD	Biaya Dubbing Profil BPMP Prov.Riau 23 dan 24 Januari 2024
2	52111	25 Januari 2024	Rp. 400,000	Penerima	Rahayu KD	Biaya Dubbing Profil BPMP Prov.Riau Tanggal 23 dan 24 Januari 2024
3	-	23 Desember 2023	Rp. 1,000,000 -		PT Pos	Biaya Keperluan Perkantoran Berupa Pembelian Materai 10.000 sebanyak 100 lembar untuk kantor BPMP Prov.Riau Bulan Desember 2023
4	52311	23 Desember 2023	Rp. 610,000 -		T E G U H	Biaya Jasa perawatan/ Perbaikan atap Mess dan Kantor Utama BPMP Provinsi Riau bulan Desember 2023
5	QDB.6397.096.DP.521219	19 Desember 2023	Rp. 500,000	seriau.com	Fitrial	Biaya publikasi media massa kegiatan Pilsan Sambut Kepala BPMP Provinsi Riau dan Musyawarah Daerah DPD AWR Provinsi Riau tanggal 19 Desember 2023 di BPMP Provinsi Riau
6	52411	14 Desember 2023	Rp. 375,000	Penerima	Nur Kuba Agustina	Biaya Keuangan Penginapan Kegiatan Pendampingan Kumpul Antar Sekolah dan Advokasi Rapor Pendidikan untuk Satpen Bulan November 2023
7		13 Desember 2023	Rp. 1,695,000		Raden Otong Subagio	Jasa Service dan Setting Ulang Sound

c. Dokumen Keuangan

Pada submenu ini membantu dalam pengadministrasian dan penyusunan dokumen keuangan, sehingga jika diperlukan lebih mudah untuk mencari dokumen keuangan tersebut.

Gambar 3. 6 Tampilan submenu dokumen keuangan pada aplikasi SITUAH



d. Pengajuan Tunjangan Kinerja

Pada submenu ini pengadministrasi keuangan dapat membuat pengajuan tunjangan kinerja dengan data yang bersumber dari admin kepegawaian.

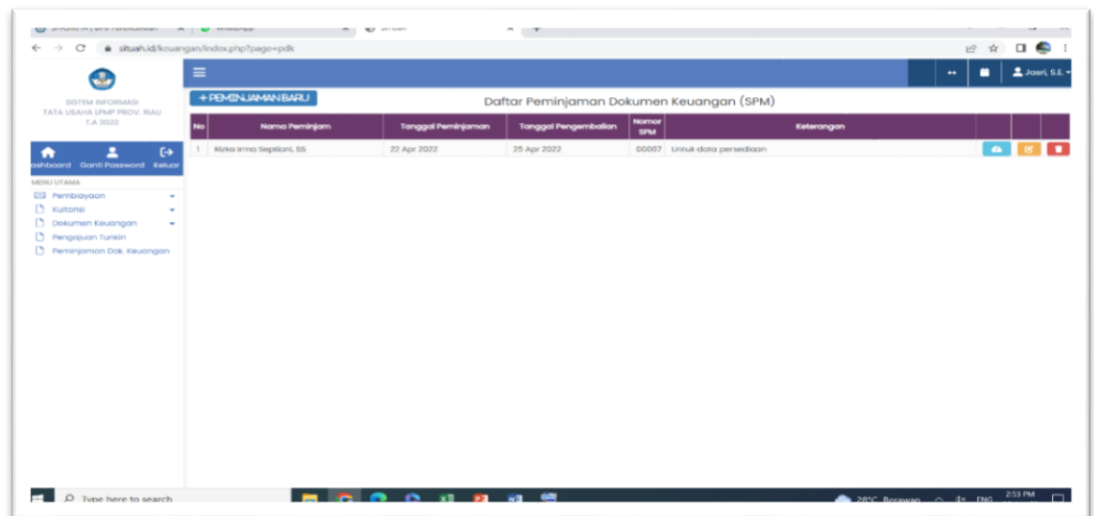
Gambar 3. 7 Tampilan Submenu Pengajuan Tunjangan Kinerja Pada Aplikasi SITUAH

No	Name	Tunjangan	% Kumulatif Komp. Capaian		PJK Hadir	Nilai Capaian	Nilai Komponen	Potongan	Bruto	PPH 21	Netto
			Nilai Capaian	Post							
Jumlah											
1	Agustina Eka Septim, S.Si., M.Pd.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
2	Azrif, M.Ed.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
3	Benny Hendrizal Eka Putra, S.Sos	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
4	Dessy Rosa Linda, M.Si.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
5	Devi Andayani	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
6	Devi Septavani Sarah Tarigan, S.H., M.H.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
7	Denny Fitriani, S.Si., M.Si.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
8	Djusepa, SE Ak.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
9	dr. Gustinar	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
10	Dr. Wiema Endrimon, M.Pd.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
11	Dr. Yusna Aldal Kahar, S.Kom., M.Kom.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
12	Dra. Deo Mardiani, M.Pd.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
13	Dra. Linda Asdar, M.Si.	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0
14	Dra. Mariani	0	%	%	%	0	0	0	0	0	0

e. Peminjaman Dokumen Keuangan

Pada submenu ini memudahkan pengadministrasian dokumen keuangan yang dipinjam oleh operator aset atau persediaan untuk kepentingan pelaporan.

Gambar 3. 8 Tampilan submenu peminjaman dokumen keuangan pada aplikasi SITUAH



2. Penghargaan

- a. BPMP Provinsi Riau memperoleh predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Gambar 3. 9 Piagam Penghargaan predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi



- b. BPMP Provinsi Riau memperoleh predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Gambar 3. 10 Piagam Penghargaan predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi



- c. BPMP Provinsi Riau memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Gambar 3. 11 Piagam Penghargaan predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi



- d. BPMP Provinsi Riau mendapatkan penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti

Gambar 3. 12 Penghargaan dari dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti



3. Program *Crosscutting / Collaborative*

Pada tahun 2023, BPMP Provinsi Riau melakukan program *crosscutting / collaborative* dengan mitra kerja sebagai berikut:

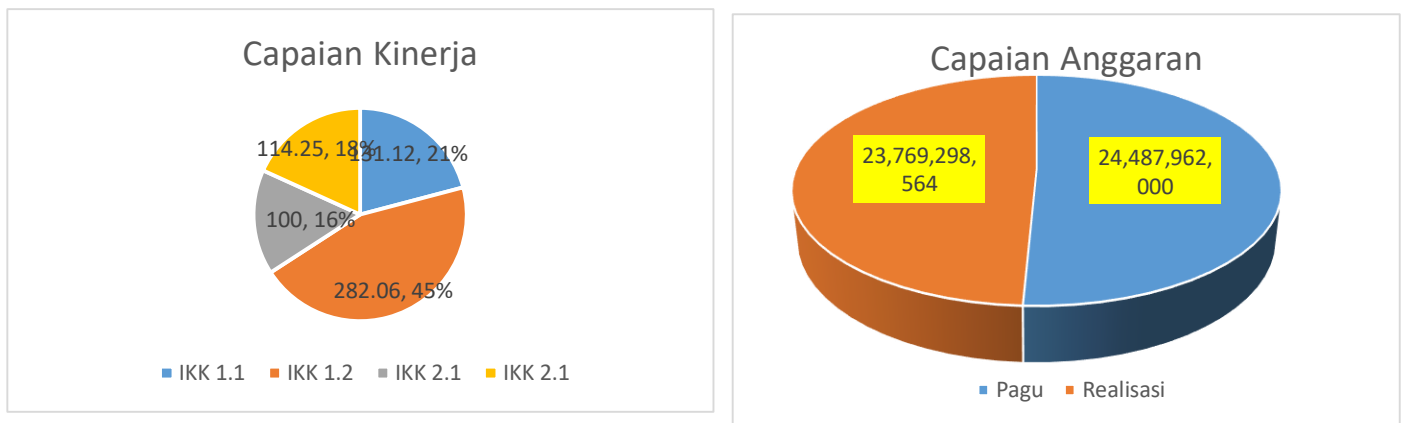
- a. Tanoto Foundation
BPMP Provinsi Riau berkolaborasi dalam pelaksanaan program strategis prioritas Kemendikbudristek yakni program merdeka belajar. Terutama Kabupaten/Kota sasaran Tanoto Foundation yang beririsan dengan Kabupaten/Kota sasaran BPMP Provinsi Riau. Antara lain:
 - Peningkatan perencanaan berbasis data berdasarkan platform rapor Pendidikan
 - Percepatan pembuatan regulasi pemerintah daerah seperti PERWAKO atau PERBUP terkait merdeka belajar
- b. Balai Guru Penggerak Provinsi Riau
BPMP Provinsi Riau berkolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
- c. Universitas Riau
BPMP Provinsi Riau berkolaborasi dengan Universitas Riau dalam rangka kegiatan program kampus mengajar provinsi Riau Angkatan V dan VI.
- d. Balai Bahasa Provinsi Riau
BPMP Provinsi Riau berkolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Riau dalam hal penyelarasan program terkait dengan literasi.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja BPMP Provinsi Riau pada tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 156,86 % dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian 3 dari 4 IKK adalah >100% sementara 1 IKK sama dengan 100%. Capaian kinerja tersebut juga didukung kinerja keuangan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 23.769.298.564,- atau 97,06% dari total pagu sebesar Rp 24.487.962.000,-.

Grafik 4. 1 Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran BPMP Provinsi Riau tahun 2023



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Kondisi geografis beberapa Kabupaten di Provinsi Riau yang sulit dijangkau;
2. Masih kurangnya kontribusi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pemetaan dan penataan satuan pendidikan yang non aktif sehingga mempengaruhi persentase pengiriman pada Dapodik;
3. Nilai IKPA yang masih rendah jika dibandingkan dengan nilai EKA.
4. Komunitas Belajar yang sudah berjalan di sekolah IKM banyak yang masih berupa Kombel Antar Sekolah dan Kombel Daring, bukan Kombel Intra Sekolah yang berfokus pada permasalahan peserta didik
5. Penetapan status pelaksanaan masih bisa berubah sampai dengan pelaksanaan AN utama jadi data yang dikumpulkan masih bergerak;
6. Minimnya anggaran untuk ANBK sehingga hanya bisa melakukan Simulasi, Gladi dan Monev di jenjang sekolah dasar;
7. Posko ANBK tingkat Kabupaten banyak yang tidak berjalan sesuai dengan POS ANBK;
8. Banyak ajuan permasalahan di web ANBK yang tidak ditanggapi;
9. Masih banyak satuan pendidikan yang kesulitan dalam akses internet dan jarak sekolah yang akan ditumpangai jauh.


Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan mitra terkait lain, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pendataan, implementasi program dan anggaran program;
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang ditargetkan;
3. Membuat manajemen resiko dan evaluasinya agar pencapaian target kinerja dapat terlaksana sesuai rencana secara efektif dan efisien di awal tahun;
4. Melakukan evaluasi internal mengenai capaian kinerja lembaga secara berkala atas progress capaian target.
5. Menganggarkan secara tepat sehingga dapat melaksanakan kegiatan ANBK di semua jenjang;
6. Advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendata sekolah yang mengalami kesulitan akses internet untuk segera dapat dicarikan sekolah menumpanginya. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
2. Pengukuran Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Revisi Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Revisi Pengukuran Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
5. Daftar Program dan kegiatan BPMP Provinsi Riau
6. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

1. Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:



Nama : Wisma Endrimon
Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Riau
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril
Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

<p>Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,</p>  <p>Iwan Syahril</p>	<p>Kepala BPMP Provinsi Riau,</p>  <p>Wisma Endrimon</p>
--	--

2. Pengukuran Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	84

3. Revisi Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nilam Suri

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Iwan Syahril

Kepala BPMP Provinsi Riau,

Nilam Suri

4. Revisi Pengukuran Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	84

5. Daftar Program dan kegiatan BPMP Provinsi Riau

No	Ikk	Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
A	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1. Advokasi kepada pemerintah daerah dalam pendampingan IKM kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting	13 maret 2023	Aplikasi zoom
	TW 1	2. Melakukan identifikasi pemangku kepentingan melalui penyusunan powermap pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten kota di	Tgl 9-21 maret 2023.	kabupaten di provinsi Riau

		Provinsi Riau		
		3. Rapat antar UPT dan Provinsi Riau, rapat antar UPT dan Kab. Bengkalis, rapat antar UPT dan kab. Indragiri Hilir, rapat antar UPT dan kab. Indragiri Hulu, rapat antar UPT dan kab. Kampar, rapat antar UPT dan kab. Meranti, rapat antar UPT dan kab. Kuantan Singingi, rapat antar UPT dan kab. Pelalawan, rapat antar UPT dan kab. Rokan Hilir, rapat antar UPT dan kab. Rokan Hulu, rapat antar UPT dan kab. Siak, rapat antar UPT dan kota Dumai, rapat antar UPT dan kota Pekanbaru	9-21 maret 2023	12 kab/kota di Provinsi Riau
		4. Pelaksanaan kegiatan pelepasan Kampus Mengajar 5 Provinsi Riau	17 februari 2023	Aula Kihajar BPMP Provinsi Riau
		5. Pelaksanaan pemilihan pengadaan jasa konsultan pelayanan mutu pendidikan BPMP Prov. Riau : 1. Pelaksanaan pendampingan SPM kepada Dinas Pendidikan, kabupaten dan kota dan Bappedalitbang, kab kota, 2. Mengawal pelaksanaan perencanaan berbasis data Pemda melalui kegiatan Forum OPD dan Musrebang tingkat provinsi/kab/kota	16-18 maret 2023,	BPMP Provinsi Riau
	TW 2	1. Kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Sekolah Penggerak Tahap I	25- 27 mei 2023	Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kota Dumai
		2. Kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Sekolah Penggerak Tahap 2	7-9 mei 2023	Kab. Kuantan Singingi, kab. Rokan Hilir, dan Kab. Indragiri Hilir
		3. Kegiatan rapat koordinasi pendampingan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan	5-6 juni 2023	
		4. IHT series	4-14 april 2023	
		5. Menyusun program kerja UPT terkait AN dan Sulingjar		
		6. Koordinasi dengan PDM 06 Terkait pelaksanaan AN Dan Sulingjar		
		7. Kegiatan Monev Pelaksanaan PBD Pemda	22-24 mei 2023	
		8. Pendampingan perencanaan daerah TA 2024	12-14 juni 2023	

	TW 3	1. Kegiatan Monev MPLS PAUD/SD Se-Provinsi Riau	16-22 Juli 2023	
		2. Kegiatan Advokasi Pemda dalam kebijakan dalam pengangkatan Guru Penggerak menjadi KS/PS	19 -20 September 2023	Hotel Premier Pekanbaru
		3. Kegiatan pendampingan terkait miskonsepsi IKM	13-15 Juli 2023	
		4. Kegiatan advokasi komunitas belajar intra sekolah pada sekolah IKM secara daring	25 Agustus 2023	
		5. Berbagi cerita antar UPT dengan pemerintah daerah tahap 1 secara daring	22 Agustus 2023	
		6. Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Chrome Untuk pembelajaran pada sekolah penerima bantuan TIK jenjang PAUD	20-22 Agustus 2023	
		7. Sosialisasi pemanfaatan platform sumber daya sekolah (SDS) kepada Dinas Pendidikan	22-27 September 2023	
		8. Kegiatan Advokasi pemanfaatan Rapor Pendidikan dan PBD satpen kepada PMO, Disdik, Kombel PBD dan Mitra pembangunan		
		9. Kegiatan advokasi akses rapor pendidikan bagi Pemda di Provinsi Riau		BPMP Provinsi Riau
		10. Kegiatan Choaching Clinic Implementasi PBD Satpen		
	TW4	1. Pendampingan penguatan transisi PAUD-SD		
		2. Monev pelaksanaan gerakan sekolah sehat		
		3. Bimtek operator pengangkatan GP menjadi KS/PS	2-4 okt 2023	
		4. Refleksi Komunitas belajar intra sekolah dalam bentuk FGD	6-8 nov 2023	
		5. Pendampingan percepatan pelaporan dan BOP TA 2023		
		6. Sosialisasi pemanfaatan platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan Satpen		
		7. ToT penggunaan dan pemanfaatan platform SDS untuk peningkatan adopsi ARKAS dan SIPla	5-8 okt 2023	
		8. Pendampingan pemanfaatan platform		

		SDS tahap II		
		9.Kegiatan refleksi dan evaluasi komunitas belajar		
		10.advokasi akses rapor pendidikan bagi Pemda di Prov. Riau		
		11. Monev Implementasi PBD di satuan pendidikan		
B	[IKK 1.2] Presentase provinsi dan kab/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas/Dikmen)	1. Advokasi kepada pemerintah daerah dalam pendampingan IKM kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting	13 maret 2023	Aplikasi zoom
	TW I	2. Melakukan identifikasi pemangku kepentingan melalui penyusunan powermap pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Riau	Tgl 9-21 maret 2023.	Semua kabupaten di provinsi Riau
		3. Rapat antar UPT dan Provinsi Riau, rapat antar UPT dan Kab. Bengkalis, rapat antar UPT dan kab. Indragiri Hilir, rapat antar UPT dan kab. Indragiri Hulu, rapat antar UPT dan kab. Kampar, rapat antar UPT dan kab. Meranti, rapat antar UPT dan kab. Kuantan Singingi, rapat antar UPT dan kab. Pelalawan, rapat antar UPT dan kab. Rokan Hilir, rapat antar UPT dan kab. Rokan Hulu, rapat antar UPT dan kab. Siak, rapat antar UPT dan kota Dumai, rapat antar UPT dan kota Pekanbaru	9-21 maret 2023	12 kab/kota di Provinsi Riau
		4. Pelaksanaan kegiatan pelepasan Kampus Mengajar 5 Provinsi Riau	17 februari 2023	Aula Kihajar BPMP Provinsi Riau
		5. Pelaksanaan pemilihan pengadaan jasa konsultan pelayanan mutu pendidikan BPMP Prov. Riau : 1. Pelaksanaan pendampingan SPM kepada Dinas Pendidikan, kabupaten dan kota dan Bappedalitbang, kab kota, 2. Mengawal pelaksanaan perencanaan berbasis data Pemda melalui kegiatan Forum OPD dan Musrembang tingkat provinsi/kab/kota	16-18 maret 2023,	BPMP Provinsi Riau

	TW 2	1. Kegiatan Monev Pelaksanaan PBD Pemda	22-24 mei 2023	
		2. Pendampingan perencanaan daerah TA 2024	12-14 juni 2023	
		3. Menyusun program kerja UPT terkait AN dan Sulingjar		
		4. Koordinasi dengan PDM 06 terkait pelaksanaan AN dan Sulingjar		
	TW 3	1. Kegiatan MPLS PAUD/SD se-Provinsi Riau	16-22 juli 2023	
		2. kegiatan monev PPDB tahun 2023	20-22 juli 2023	13 kab/kota
		3. Kegiatan pendampingan terkait miskonsepsi IKM	13-15 juli 2023	
		4. Kegiatan advokasi Pemda dalam kebijakan pengangkatan Guru Penggerak menjadi KS/PS	19-20 september 2023	Hotel Premier, Pekanbaru
		5. Kegiatan Advokasi Komunitas Belajar Intra Sekolah pada sekolah IKM	25 Agustus 2023	
		6. Berbagi cerita antar UPT dengan pemerintah daerah Tahap 1	22 Agustus 2023	
		7. Kegiatan persiapan fasilitasi pemanfaatan chromebook untuk pembelajaran	17-18 Juli 2023	
		8. Kegiatan pendampingan proses verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	8-12 Agustus 2023	
		9. Kegiatan Bimtek pemanfaatan chromebook untuk pembelajaran pada sekolah penerima bantuan TIK jenjang PAUD	20-22 Agustus 2023	
		10. Kegiatan Bimtek pemanfaatan chromebook untuk pembelajaran pada sekolah penerima bantuan TIK jenjang Dikdas dan Dikmen	23-26 Agustus 2023	11 Kabupaten/Kota Prov. Riau
		11. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AN jenjang SMA/SMK sederajat/kesetaraan Tahun 2023	28-30 agus 2023	
		12. Kegiatan sosialisasi kebijakan AN ke satuan pendidikan	7-9 sept 2023	
		13. Sosialisasi pemanfaatan Platform SDS kepada Dinas Pendidikan	25-27 sept 2023	
		14. Kegiatan Monev Gladi Bersih AN TA 2023 jenjang SMP	12-14 sept 2023	
		15. Kegiatan monev Pelaksanaan ANBK jenjang SMP	17-22 sept 2023	
		16. Kegiatan kick off pelepasan	10 agust 2023	

		penugasan peserta program kampus mengajar angkatan 6 TA 2023		
		17. Kegiatan Advokasi akses rapor pendidikan bagi Pemda di Provinsi Riau TA 2023		BPMP Provinsi Riau
		18. Kegiatan Coaching Clinic Implementasi PBD Satpen		
		19. Kegiatan FGD Pembudayaan Literasi	7-8 September 2023	BPMP Provinsi Riau
	TW IV	1. Monev uji petik SD pelaksana Calistung	9-11 okt 2023	Kab/kota Prov. Riau
		2. Pertemuan PMO bulan Oktober	19-21 okt 2023	Kab/kota di Prov Riau
		3. Pertemuan PMO bulan November dan refleksi KMB	13-15 November 2023	Hotel labersa Kampar
		4. Pertemuan PMO bulan Desember Pelaksanaan PMO daerah	4-6 Desember 2023	Kabupaten/Kota Provinsi Riau
		5. Pendampingan pengisian aplikasi TKSI Gerakan sekolah sehat	6-8 November 2023	Kab/kota Prov. Riau
		6. Pendampingan Penguatan Transisi PAUD - SD		
		7. Monev Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat		
		8. Bimtek Operator Pengangkatan GP menjadi KA-PS tanggal	2-4 Oktober 2023	
		9. Advokasi PEMDA dalam Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Agar Delta AN Meningkat	12 s.d 25 Oktober 2023	
		10. Refleksi Komunitas Belajar Intra Sekolah dalam bentuk FGD	6-8 November 2023	
		11. Berbagi Cerita antar UPT dan Pemda Tahap 2 secara daring	9 November 2023	
		12. Refleksi Kebijakan Merdeka Belajar dengan Pemda	13-15 November 2023	
		13. Peningkatan Kapasitas SDM BPMP Prov. Riau dalam Bidang Publikasi	14-15 Desember 2023	
		14. Sosialisasi Kebijakan AN ke Satuan Pendidikan	7 s.d 9 September 2023	
		15. Monitoring Pelaksanaan AN jenjang SMA & PKBM	28 sd 31 Agustus 2023	
		16. Monev Gladi AN SD	9 s.d 11 Oktober 2023	
		17. Monev Pelaksanaan AN jenjang SD tahun 2023		
		18. Monitoring dan Evaluasi Survei Lingkungan Belajar	12 s.d 14 Oktober 2023	
		19. Pendampingan Percepatan	09 s.d 11	

		Pelaporan Dana BOS melalui ARKAS 4.0	November 2023	
		20. Pendampingan Percepatan Pelaporan Dana BOP TA 2023		
		21. Sosialisasi Pemanfaatan Platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan Satpen		
		22. ToT Penggunaan dan Pemanfaatan Platform SDS utk Peningkatan Adopsi ARKAS & Siplah	5 S.d 8 Oktober 2023	
		23. Pendampingan Pemanfaatan Platform SDS (ARKAS dan SIPLAH) Bagi Satuan Pendidikan Tahap I dan II		
		24. Pendampingan Percepatan Pelaporan Dana BOSP melalui ARKAS 4.0	29 s.d 1 Desember 2023	
		25. Kegiatan Refleksi dan Evaluasi Komunitas Belajar		
		26. Koordinasai Sosialisasi Kebijakan Inklusi Kepada PEMDA dan Mitra Pembangunan	02 s.d 04 November 2023	
		27. Advokasi PEMDA dalam Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Agar Delta AN Meningkat		

		28. Advokasi Akses Rapor Pendidikan bagi Pemda di Provinsi Riau		
		29. Monev Implementasi PBD di Satuan Pendidikan		
		30. Persiapan Teknis Pelaksanaan Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran Melalui Penguatan Literasi		
		31. Pelaksanaan Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran Melalui Penguatan Literasi tahap I,II, III, dan IV		
		32. Pemantauan Tindak Lanjut Pendampingan PBD Satdik kepada PMO Disdik, Kombel PBD dan Mitra Pembangunan		
		33. Kegiatan Refleksi dan Intervensi Penguatan Literasi UP		
		34. Monitoring Realisasi SPM di Kab/Kota Provinsi Riau	20 sd 22 November 2023	
B.	[IKK 2.1] Predikat SAKIP			
	TW 1	1. Rapat Internal membahas capaian kinerja secara periodik		
		2. Melakukan pengukuran kinerja secara periodic		
	TW 2	1. Rapat Internal membahas capaian kinerja secara periodik		
		2. Melakukan pengukuran kinerja secara periodic		
		3. Kegiatan jalan sehat dalam rangka hari Pendidikan Nasional	14 mei 2023	
		4. Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi Program BPMP Prov. Riau dan PEMDA	15-17 mei 2023	Hotel Pangeran, Pekanbaru
		5. Melakukan kegiatan empowering Tim RBI di Sumatera Barat	18-21 juni 2023	Sumatera Barat
	TW 3	1. Rapat Internal membahas capaian kinerja secara periodik		
		2. Melakukan pengukuran kinerja secara periodic		
		3. Kegiatan O2SN jenjang SD dan SMP tingkat provinsi		
		4. Kegiatan Gala Siswa (GS) SMP tingkat Prov. Riau TA 2023		

	Tw 4	1. Rapat internal membahas capaian kinerja lembaga		
		2. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik		
		3. Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Riau TA.2023		
		4. Review Aplikasi SI-Tuah pada Modul SIMAK Admin Pokja , Modul SIMAK Panitia, dan Modul SIMAK Keuangan		
		5. Diseminasi Hasil Program Penjaminan Mutu Pendidikan		
		6. Patok Banding ke UPT Kemdikbudristek Provinsi DIY, DKI Jakarta, Bandung, dan Bali		
		7. Rapat Tindak Lanjut Perencanaan UPT		
		8. Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPMP Prov.Riau		
		9. Musyawarah Daerah Widyapra Indonesia		
		10. Pisah Sambut Kepala BPMP Prov.Riau		
		11.Kegiatan Benchmarking ke 4 Provinsi		
		12.Kegiatan Reviu POS.		
C.	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran			
	TW 1	1. Pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan pegawai serta honorarium tenaga PPNPN		
		2. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja		
		3. Pembiayaan keperluan perkantoran		
		4. Melakukan pemantauan terhadap nilai EKA di aplikasi Spasikita dan IKPA di molk		
	TW 2	1. Pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan pegawai serta honorarium tenaga PPNPN;		
		2. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja;		
		3. Pembiayaan Keperluan Perkantoran;		
		4. Belanja Modal		
		5.Melakukan pemantauan terhadap nilai EKA di aplikasi Spasikita dan IKPA dan Om-SPAN		

	TW 3	1. Pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan pegawai serta honorarium tenaga PPNPN		
		2. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja		
		3. Pembiayaan keperluan perkantoran		
		4. Melakukan pemantauan terhadap nilai EKA di aplikasi Spasikita dan IKPA di molk		
	TW 4	1. Pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan pegawai serta honorarium tenaga PPNPN		
		2. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja		
		3. Pembiayaan keperluan perkantoran		
		4. Melakukan pemantauan terhadap nilai EKA di aplikasi Spasikita dan IKPA di molk		

6. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BPMP PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI RIAU untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI RIAU.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 30 Januari 2024



Irfan, S.Sos
NIP. 196909012001121002

BPMP RIAU

**BEKERJA LEBIH
CEPAT
BERINOVASI LEBIH
HEBAT**